

BAB I

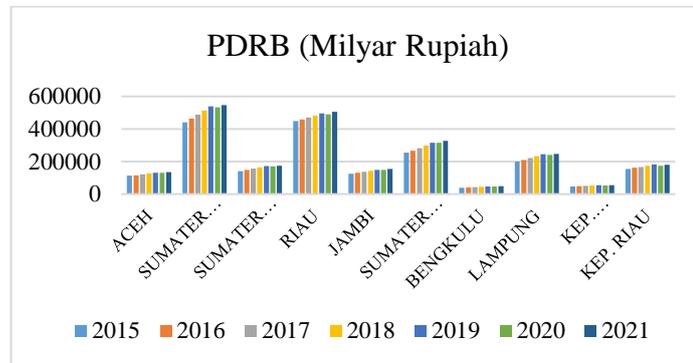
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah ukuran untuk melihat terlaksananya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila terus terjadi peningkatan atau kondisi stabil yang menandakan tingkat kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Berdasarkan teori ekonomi neo-klasik perkembangan faktor produksi yakni modal, tenaga kerja dan teknologi dapat menjadi penentu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2016) serta teori pertumbuhan klasik bahwa faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu total penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2016). Pertumbuhan ekonomi dapat diamati menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah barang serta jasa yang diperoleh dari unit-unit ekonomi dalam suatu daerah tersebut selama periode tahun tertentu.

Kepulauan Riau mempunyai peran yang strategis dalam lalu lintas perdagangan global. Peluang investasi tersebut menjadikan Kepulauan Riau mampu untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk mendukung peningkatan ekonomi perlu upaya dalam meningkatkan kondisi kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengelola sumber daya alam tersebut. Tingkat modal manusia yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar sehingga mendorong perekonomian serta pembangunan daerah tersebut. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta peningkatan kualitas SDM diperlukan peran pemerintah untuk mendorong perekonomian agar tetap berjalan dengan stabil.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari PDRB di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah) Tahun 2015-2021



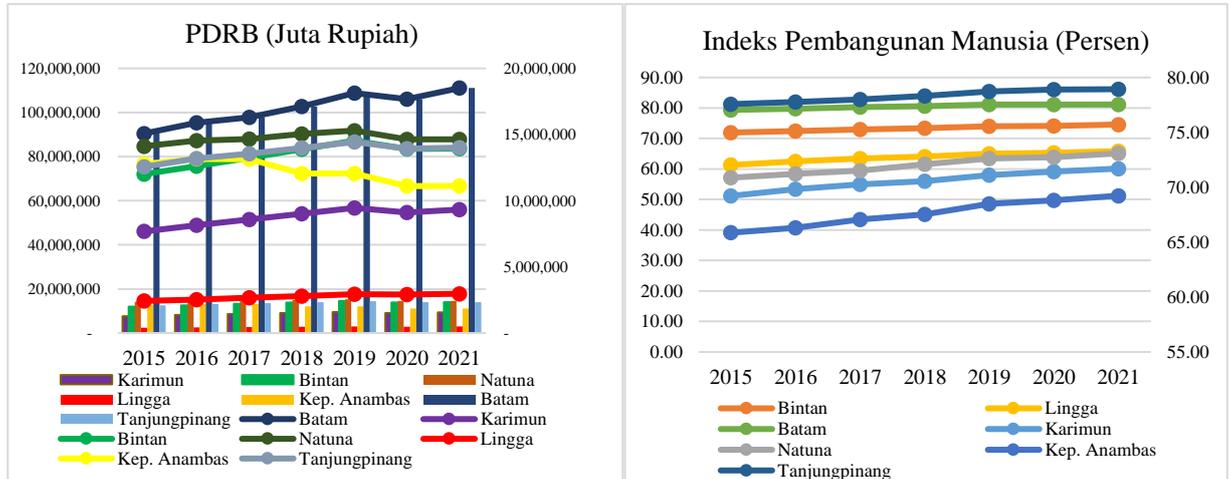
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2021)

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera berfluktuatif dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021. Perekonomian berfluktuatif dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik investasi, pengeluaran pemerintah, modal, tenaga kerja, jumlah penduduk, teknologi dan lainnya. Perekonomian tertinggi diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara dan terendah adalah Provinsi Bengkulu. Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat kelima perekonomian tertinggi di Pulau Sumatera. Rata-rata nilai PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 170,764.90 milyar rupiah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan empat provinsi peringkat teratas dengan pertumbuhan PDRB yang terus meningkat, Provinsi Kepulauan Riau justru memiliki pertumbuhan PDRB yang berfluktuatif.

Modal manusia merupakan faktor produksi yang dikatakan penting bagi suatu perekonomian negara dapat diukur melalui capaian indeks pembangunan manusia dan merupakan investasi jangka panjang untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan karena meningkatkan potensi tenaga kerja lebih produktif dan berdampak pada perekonomian. Menurut Solow bahwa peningkatan tenaga kerja dan modal saja bukan faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi keahlian dari tenaga kerja dan kemajuan teknologi adalah faktor utama guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2016). Penelitian Munawaroh & Haryanto (2020) dan Fikri (2017) modal manusia memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang menandakan jika indikator modal manusia meningkat maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

didaerah tersebut.

Grafik 2 Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) dan Indeks Pembangunan Manusia (Persen) Tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2021)

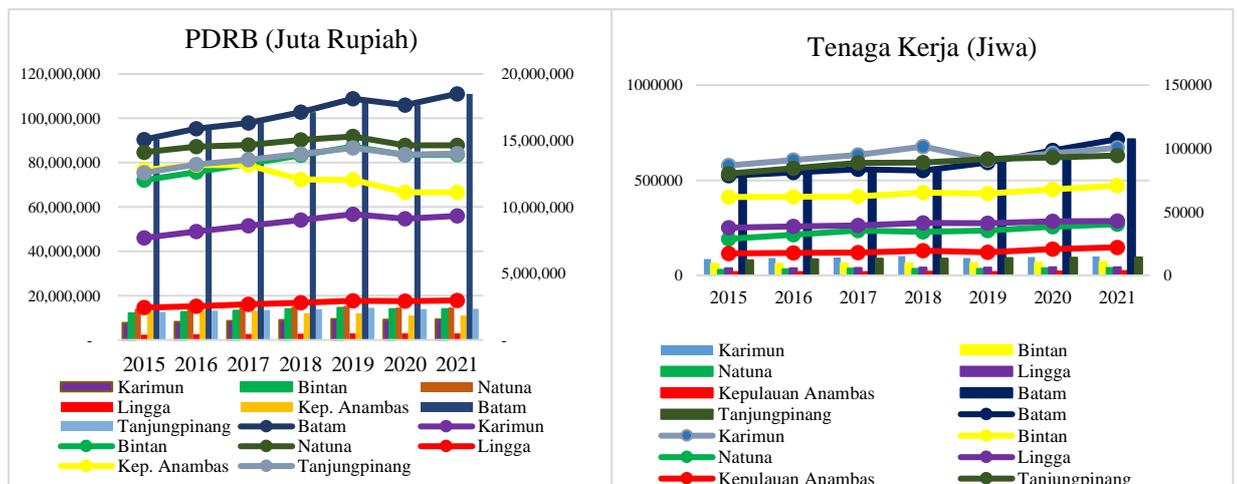
IPM di Kabupaten/Kota Kepulauan Riau cenderung meningkat meskipun terjadi perlambatan, peningkatan ini tidak selalu memberikan dampak terhadap perekonomian. Seperti tahun 2016-2019 IPM Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan namun pertumbuhan ekonominya menurun yang disebabkan melesunya sektor ekonomi dan hanya berfokus pada sektor migas (Hutabarat, 2020). Tahun 2020 IPM seluruh Kabupaten/Kota Kepulauan Riau meningkat namun pertumbuhan ekonominya menurun, dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan penurunan perekonomian secara global. Rata-rata IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 80.46% sedangkan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 63.90% menandakan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lingga masih tergolong rendah. Hal ini menandakan peningkatan IPM tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bertentangan dengan teori Romer (1990) bahwa yang menjadi sumber fundamental dalam produktifitas ekonomi adalah modal manusia yang merupakan investasi yang dapat meningkatkan tingkat produktifitas sehingga menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Bado, dkk 2017b). Serta pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari satu atau lebih tiga faktor yaitu kenaikan kuantitas serta kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk serta

pendidikan), peningkatan modal dan kemajuan teknologi. Dimana untuk mengukur pengembangan kuantitas dan kualitas tenaga kerja menggunakan IPM (Todaro & Smith, 2016) serta teori pertumbuhan ekonomi endogen menganggap faktor utama yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian adalah indikator modal manusia yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Falianty, 2019).

Fenomena yang terjadi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laga & Lobwaer (2020) yang menyatakan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta bertentangan dengan penelitian Aryanto & Handaka (2017) dan Alkhoiriyah & Sa'roni (2021) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat menyerap tenaga kerja yang besar dengan kualitas sumber daya manusianya yang baik sehingga meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan mendorong perekonomian.

Grafik 3 Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) dan Tenaga Kerja (Jiwa) di Kepulauan Riau Tahun 2015-2021



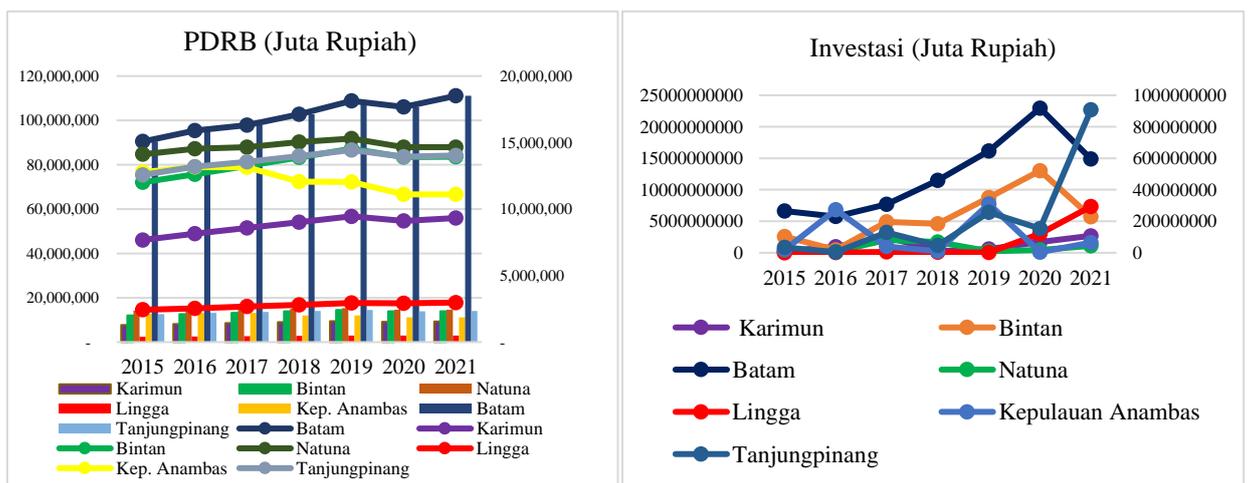
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2021)

Berdasarkan grafik diatas tenaga kerja tertinggi berada di Kota Batam yang merupakan pusat kegiatan perekonomian yang terbukti memiliki PDRB tertinggi. Meningkatnya tenaga kerja akan menaikkan tingkat produksi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada tahun 2016-2018 tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat namun pertumbuhan ekonominya menurun. Selanjutnya, tahun 2018 tenaga kerja di Kabupaten Natuna mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penutupan beberapa perusahaan industri namun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, 2018). Pada tahun 2019 tenaga kerja pada tiga Kabupaten (Karimun, Bintan dan Lingga) mengalami penurunan dikarenakan melesunya kegiatan pada dunia usaha namun pertumbuhan ekonominya meningkat karena tingginya kegiatan ekspor-impor dan didorong peran sektor industri utama (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2019b). Tahun 2021 tenaga kerja diseluruh wilayah mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya perekonomian hal ini dikarenakan adanya perbaikan ekonomi setelah pandemi tahun 2020.

Menurut teori neoklasik Solow-Swan bahwa tenaga kerja dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan tingkat produksi serta menghasilkan output yang lebih besar. Fenomena tersebut sesuai dengan penelitian Harnita,dkk (2020) yang menyatakan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun bertentangan dengan penelitian Kristina (2017) dan Aryanto & Handaka (2017) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi investasi memiliki peran penting yaitu memperluas kapasitas produksi serta menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Grafik 4 Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) dan Realisasi Investasi (juta Rupiah) di Kepulauan Riau Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, (2021)

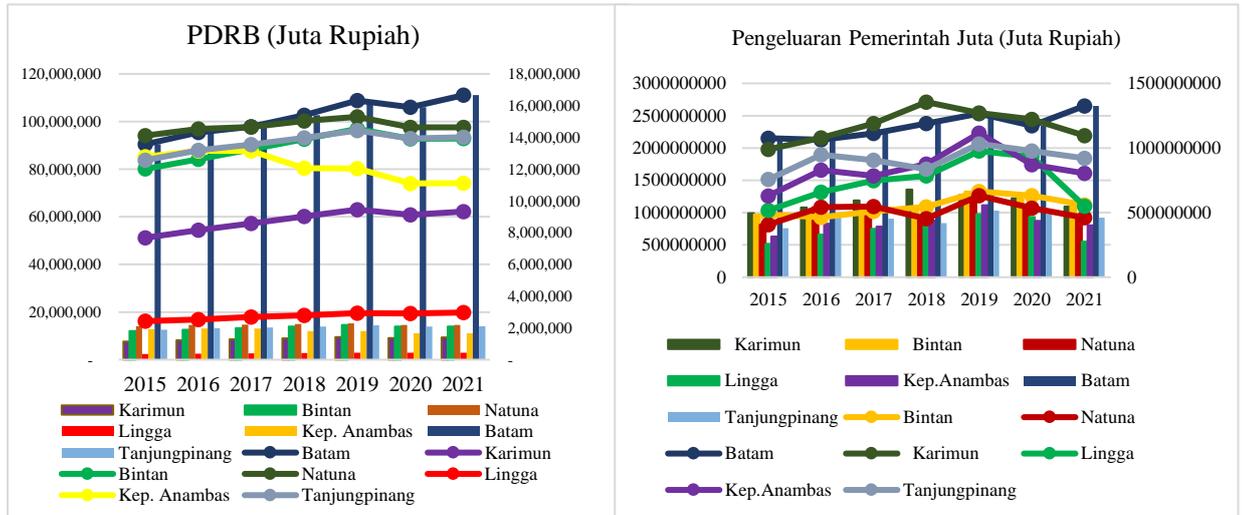
Realisasi investasi Kepulauan Riau berfluktuatif dan tersebar tidak merata karena fokus pembangunan yang belum merata diwilayah tersebut. Investasi tertinggi dicapai oleh Kota Batam yang merupakan pusat pengembangan investasi

di Kepulauan Riau sedangkan investasi terendah adalah Kabupaten Lingga. Pada tahun 2020 investasi di empat Kabupaten/Kota (Karimun, Bintan, Lingga dan Kota Batam) meningkat namun diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan investasi pada tiga wilayah (Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang) namun penurunan yang signifikan terjadi di Kabupaten Karimun dikarenakan menurunnya investasi asing pada wilayah tersebut tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhannya, hal yang sama terjadi tahun 2017-2019 di Kabupaten Natuna dan Lingga investasi mengalami penurunan namun pertumbuhan ekonominya meningkat hal ini karena melesunya penanaman investasi dalam negeri dan asing pada tahun 2018 dan 2019.

Hal tersebut membuktikan bahwa investasi tidak selalu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan investasi dapat meningkatkan jumlah barang modal, kenaikan investasi dapat memberikan pertumbuhan pada perekonomian (Sukirno, 2016). Penelitian Erjergit, dkk (2021) bahwa tidak ada pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian Mutia Sari, dkk (2016) dan Ginting (2017) terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi yang meningkat dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga pendapatan suatu daerah akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Grafik 5 Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) dan Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah) Tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2021)

Berdasarkan grafik diatas pengeluaran pemerintah di Kepulauan Riau berfluktuasi. Tahun 2017-2019 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan alokasi dana yang tidak merata. Tahun 2016 pengeluaran pemerintah di Kota Batam dan Kabupaten Bintan mengalami penurunan namun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya nilai produksi sektor kontruksi diwilayah tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2017). Selanjutnya tahun 2016-2018 pengeluaran pemerintah di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan karena menurunnya alokasi dana APBD namun pertumbuhan ekonominya meningkat dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penduduk serta tahun 2018 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Natuna meningkat namun cenderung ekspansif sedangkan tidak didorong oleh meningkatnya pendapatan daerah sehingga pertumbuhan ekonominya menurun (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2019). Pada tahun 2021 realisasi pengeluaran pemerintah di enam Kabupaten/Kota (Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Tanjungpinang) mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan ekonominya meningkat karena terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk serta kegiatan dunia usaha (Bank Indonesia, 2022a).

Menurut teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran yang menghambat pertumbuhan ekonomi (Hasan & Azis, 2018).

Fenomena yang terjadi bertolak belakang dengan penelitian Pangiuk (2017) yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan sesuai pada penelitian Lebang et al (2017) yang menyatakan tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, potensi pengembangan investasi dengan IPM yang membaik di Kepulauan Riau dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dengan kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga alokasi dana ke penduduk meningkat dan berpengaruh pada perekonomian. Peneliti tertarik mengambil penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau dengan judul **“Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Di Kepulauan Riau”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau selama enam tahun terakhir berfluktuatif. Modal fisik serta modal manusia dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Peningkatan capaian indeks pembangunan manusia serta investasi tidak serta merta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau karena investasi tidak tersebar secara merata sehingga belum menyerap tenaga kerja sehingga belum mampu menghasilkan output yang lebih besar serta pengeluaran pemerintah yang belum optimal yang menyebabkan peningkatan yang terjadi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat sebuah perumusan masalah untuk menentukan apakah indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap suatu perekonomian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau?
- b. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau ?
- c. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau ?
- d. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau
- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan agar dapat memberikan suatu manfaat yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam bidang penelitian dan penerapan teori serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait kondisi pertumbuhan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi atau gambaran khususnya pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan fisik sehingga dapat mencapai pembangunan daerah.

2) Penelitian Bagi Masyarakat

Penelitian dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan gambaran kondisi perencanaan pembangunan daerah sehingga masyarakat dapat mempersiapkan untuk dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.

3) Penelitian Bagi Peneliti

Penelitian dapat dijadikan sebuah kajian guna mengembangkan wawasan terkait permasalahan yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai ada tidaknya persamaan fenomena nyata dengan teori dasar yang sudah ada.